

DAFTAR PUSTAKA

- BPK RI. (2000). UU Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. *Peraturan BPK.Go.Id*. <https://jdih.esdm.go.id/peraturan/UU No. 17 Th 2000.pdf>
- Datacenter.ortax. (2022). *PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71/PMK.03/2022 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERTENTU*. Datacenter.Ortax.Org. <https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/17757>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2021). *SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 01/PJ./1991 TENTANG PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN DAN PEMBEBANANNYA SEBAGAI BIAYA PERUSAHAAN*. Datacenter.Ortax.Org. <https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/2210>
- Dirjend Pajak. (2022). *Fungsi Pajak*. Pajak.Co.Id. <https://pajak.go.id/id/fungsi-pajak>
- Kemenkeu.go.id. (2007). *UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan ketiga atas UU No 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2007/28tahun2007uu.htm>
- Kemenkeu.go.id. (2009). *Undang - Undang No 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat atas UU No 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. <https://jdih.kemenkeu.go.id>
- Kemenkeu.go.id. (2021). *UURI No 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.
- Kemenkeu.go.id. (2022). *Undang-Undang No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Djpk.Kemenkeu.Go.Id. <https://djpk.kemenkeu.go.id>
- Kemenkeu. (2023). *APBN Kita Desember 2023*. *Kemenkeu.Go.Id*, 1–90. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/apbn-kita/>
- Kemenkeu Republik Indonesia. (2009). *UU No 42 Tahun 2009 Tentan Perubahan Ketiga atas UU No 8 Tahun 1983 Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*.
- Mekari KlikPajak. (2024). *Tarif Denda PPN: Sanksi Telat Bayar & Terlambat Laporan PPN*. Klikpajak.Id. <https://klikpajak.id/blog/tarif-denda-ppn-keterlambatan-dan-kesalahan-bayar-dan-lapor/#:~:text=b. Tarif Denda Telat Laporan,lapor PPN adalah Rp500.000>
- Menteri Keuangan RI. (2021). *KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 296/KMK.04/1994 TENTANG PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN*. Datacenter.Ortax.OrG.

<https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/555>

Oktyandito wisnu, Y. (2024). *20 Pengertian Pajak Menurut Para Ahli dan Undang-Undang*. Idntimes.Com.

<https://www.idntimes.com/business/economy/yogama-wisnu-oktyandito/pengertian-pajak-menurut-para-ahli>

OnlinePajak. (2024). *Nilai Lain PPN: Salah Satu Dasar Pengenaan Pajak*. Online.Pajak.Com. <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/nilai-lain-ppn>

Prof. Dr. Mardiasmo, M. A. Q. Cf. C. (2019). *Perpajakan*. Penerbit ANDI.

